

PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA PEMERATAAN PENDAPATAN

Murwatie B. RAHARDJO *

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain disebutkan bahwa salah satu tugas nasional pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Khususnya di bidang pendidikan disebutkan (Bab XII, pasal 31, ayat 1) bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya (ayat 2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain dikatakan bahwa usaha pendidikan juga harus meliputi program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

Pernyataan-pernyataan di atas jelas merupakan suatu cita-cita agar seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang golongan, usia, laki-laki atau perempuan, memperoleh kesempatan pendidikan guna mengejar keterbelakangan dan mencapai kepandaian, kecerdasan dan ketrampilan. Karena dengan mendapatkan pendidikan diharapkan bahwa penduduk, terutama sebagian besar yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan, dapat meningkatkan hidupnya dengan lebih baik.¹ Keharusan ini lebih dipertegas lagi dalam alam pembangunan lima tahun tahap ketiga (Pelita III), di mana cita-cita pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan mendapat perhatian yang utama.

* Staf CSIS

1 Yang dimaksudkan dengan "lingkaran kemiskinan" adalah keadaan hidup yang dari dirinya sendiri tidak dapat mencapai perbaikan, jadi berada dalam suatu lingkaran. Untuk dapat keluar dari lingkaran ini pendidikan merupakan faktor yang penting. Tetapi, tanpa bantuan luar pendidikan tidak dapat diperoleh, karena tidak "terbeli" oleh penduduk yang miskin.

Seperti tertuang dalam Repelita III, yang menjadi pusat perhatian kita sekarang ini adalah usaha-usaha untuk mencapai pemerataan pembangunan di segala bidang, menuju kepada pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini mutlak diperlukan adanya sarana-sarana penunjangnya. Salah satu di antaranya yang terpenting adalah pembangunan bidang pendidikan.

Di bawah ini akan diuraikan tentang hubungan timbal-balik antara pendidikan dengan pendapatan dengan meninjau kenyataan-kenyataan yang ada di Indonesia dewasa ini.

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

Peledakan jumlah penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada abad ke-20 ini, selain memerlukan peningkatan jumlah pangan, pakaian dan tempat tinggal, juga meminta peningkatan sarana dan kesempatan pendidikan.

Di Indonesia, taraf pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Taraf pendidikan yang masih rendah itu tidak hanya tercermin dari jumlah rakyat yang masih buta huruf atau yang belum berkesempatan sekolah dan putus sekolah, akan tetapi dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya taraf kebersihan dan taraf kesehatan yang masih rendah karena kurang dipahami dan diterapkan prinsip-prinsip hidup sehat, pemborosan waktu dan tenaga terutama bagi buruh berpenghasilan sangat rendah, pemborosan uang terutama pada waktu sehabis panen, cara bertani dengan produktivitas rendah, dan sebagainya. Gambaran ini akan terlihat jelas pada kehidupan daerah pedesaan di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia berada.

Diperkirakan dewasa ini sejumlah 21 juta penduduk berusia 10 - 45 tahun masih buta huruf latin dan sejumlah 1.677.000 anak putus Sekolah Dasar. Pada tahun 1970, dari penduduk berumur sekolah hanya 28,5% yang sempat memperoleh pendidikan dalam berbagai tingkat pendidikan (Tabel 1). Kenyataan ini menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Seperti diketahui, untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik diperlukan pembiayaan yang besar. Tenaga pendidik yang baik perlu memperoleh imbalan yang cukup agar supaya dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga sarana-sarana lain terutama untuk pendidikan formal, seperti gedung sekolah, peralatan dan lain-lain, semuanya memerlukan biaya.

Tabel 1

Tingkat pendidikan	Murid		Penduduk umur sekolah		% jumlah murid terhadap penduduk umur sekolah yang bersangkutan
	Jumlah	% jumlah murid	Jumlah	% jumlah penduduk	
SD	12.804.000	85,5	23.106.900	44,1	55,4
SLP	1.341.170	9,0	10.235.500	19,5	13,1
SLA	583.580	3,8	9.605.500	18,3	6,1
PT	237.842	1,7	9.450.000	18,1	2,8
Jumlah	14.966.592	100,0	52.399.900	100,0	28,5

Sumber: BPP, Departemen P dan K, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 39

Kemampuan sosial ekonomi yang masih rendah dari sebagian besar rumah tangga di Indonesia, menyebabkan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah juga masih rendah. Ketimpangan pembagian pendapatan terutama masyarakat pedesaan yang pada umumnya bekerja di lapangan pertanian, menjadi salah satu sebab ketimpangan dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Tabel 2 kiranya akan memperkuat pernyataan ini. Pada tahun 1976 sekitar 65,8% penduduk di sektor pertanian berada di bawah hidup yang layak dengan pendapatan kurang dari Rp 4.000,00 per kapita per bulan.¹ Sedangkan di luar sektor pertanian 41,9% penduduk Indonesia mempunyai pendapatan di bawah Rp 4.000,00 per kapita per bulan. Kenyataan di dunia pendidikan pada waktu itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.

Di lain pihak memang secara nasional belum tersedia lembaga-lembaga pendidikan yang cukup. Hal ini terlihat dari perbedaan antara jumlah murid yang meminta pendidikan dengan jumlah tempat yang tersedia. Data arus lulusan Sekolah Dasar tahun 1976 menyebutkan bahwa pada tahun sesu-

¹ Suatu batasan garis kemiskinan yang dibuat oleh Sayogyo, bahwa untuk hidup secara layak, dalam tahun 1976 diperlukan penghasilan lebih dari Rp 4.000,00 atau tepatnya Rp 4.330,00 (untuk daerah kota dan pedesaan) per kapita per bulan

Tabel 2

PEMBAGIAN PENDAPATAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 1976*

Kelompok Pendapatan (Rupiah)	Sektor Pertanian		Di luar Sektor Pertanian		Sektor Buruh	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
- 1.000	2.242	6,6	838	3,6	1.141	3,8
1.000 - 2.000	5.605	16,5	1.511	6,5	2.655	8,7
2.000 - 4.000	14.486	42,7	7.377	31,8	8.601	28,3
4.000 - 10.000	10.789	31,7	10.824	46,8	13.615	44,9
10.000 - ke atas	854	2,5	2.617	11,3	4.340	14,3
Jumlah	33.976	100,0	23.167	100,0	30.352	100,0

Catatan: * Berdasarkan pengeluaran rumah tangga

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Data Susenas V 1976*

dahnya (1977) hanya 65,3% yang melanjutkan Sekolah Lanjutan Pertama.¹ Ada kemungkinan bahwa tarif uang sekolah tidak berada di luar batas kemampuan banyak orang tua murid. Tetapi di lain pihak, tidak diketahui bagaimana sekolah-sekolah menentukan syarat-syarat penerimaan murid misalnya sejauh mana murid-murid yang mampu membayar, uang sekolah didahulukan dari mereka yang tidak mampu membayar, terutama pada sekolah-sekolah yang kekurangan tempat. Syarat-syarat penerimaan murid berbeda-beda di setiap sekolah, misalnya menurut umur, testing, tempat tinggal, kemampuan membayar uang sekolah dan sebagainya. Tetapi jelas bahwa pada tahun 1972 beban pembayaran uang sekolah sudah terlalu berat bagi kebanyakan golongan berpendapatan rendah.² Memang benar beban itu harus dipikul juga oleh orang tua murid dan bukan saja oleh pemerintah. Untuk golongan berpendapatan rendah dirasakan beban itu sudah terlalu berat dan kenaikan uang sekolah mungkin sekali akan mengakibatkan pendidikan hanya dapat dinikmati orang-orang yang mampu.

Di Indonesia, meskipun tidak ada data-data pasti yang mengungkapkan pengaruh pendapatan masyarakat terhadap pendidikan, tetapi secara umum dapat dilihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat yang masih rendah.

1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen P dan K, *Rangkuman Statistik Persekolahan Departemen P dan K*, Jakarta, 1978

2 Ruth Daroesman, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya, 1975), hal. 29

Di negara berkembang seperti Indonesia peranan pemerintah dalam dunia pendidikan sangat penting. Pemerintah diharapkan mengatur pelaksanaan pendidikan dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan bahwa pembangunan itu sendiri memerlukan tenaga-tenaga yang trampil. Sistem pemberian subsidi oleh pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh yang berarti. Subsidi ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini hanya golongan berpendapatan tinggi saja yang dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas. Namun pemberian subsidi bukanlah satu-satunya usaha dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Sesuai dengan asas pendidikan yang kita anut, masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam hal ini golongan berpendapatan tinggi diharapkan membantu golongan berpendapatan rendah dalam bidang pendidikan. Sebenarnya, melalui sistem perpajakan secara tidak langsung golongan berpendapatan tinggi membantu pembiayaan pendidikan. Di beberapa negara maju penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh masyarakat melalui sistem perpajakan progresif yang mampu membiayai sektor pendidikan yang terbuka untuk semua.¹ Sedangkan sistem perpajakan yang ada di Indonesia belum mampu memberikan hasil yang sepenuhnya dapat membantu kemajuan pendidikan. Pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah juga masih terbatas.

Pelaksanaan keluarga berencana juga secara tidak langsung merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah dalam mengatasi pembiayaan pendidikan. Dengan membatasi jumlah anak, maka makin memberi banyak kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Di Korea Selatan dunia industri terlibat langsung dan aktif dalam dunia pendidikan, sebab disadari bahwa kemajuan industri hanya bisa ditunjang oleh pendidikan yang baik.²

Pembangunan yang diukur melalui berbagai indikator-indikator ekonomi belum memberikan gambaran yang utuh. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari tingkat pembangunan sosial ekonomi.³ Salah satu petunjuk kemajuan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP). Sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1977 terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang cukup berarti: nilai produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 1973 rata-rata mengalami kenaikan sekitar 8,0% tiap tahun. Peningkatan pendapatan secara nasional belum tentu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

1 Jean Pierre Jallade, "Financing Education for Income Distribution", *Finance & Development*, Maret 1979, hal. 36

2 *Kompas*, 16 Agustus 1979

3 Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 1977), hal. 29

Untuk menimbulkan efek pemencaran (spreading effect) dalam pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah memperhatikan perencanaan yang bersifat regional. Rencana pembangunan daerah meliputi program-program dan proyek-proyek pemerintahan pusat yang berada di daerah tertentu, dan program-program serta proyek-proyek daerah sendiri. Satu bentuk program yang dewasa ini di Indonesia cukup berhasil adalah program-program bantuan untuk daerah-daerah. Program-program ini secara populer disebut program-program Inpres (Instruksi Presiden). Dalam bidang pendidikan, program bantuan ini menyangkut pembangunan sarana pendidikan dasar yang dikenal dengan program SD Inpres. Dalam tahun 1977, dari keseluruhan jumlah SD sebanyak 83.539 buah, 18,6% merupakan SD Inpres (15.566 buah).¹ Pada permulaan Repelita II, jumlah SD Inpres baru mencapai sekitar 6.000 buah. Dengan perkembangan yang pesat ini diharapkan bahwa semakin besar persentase penduduk umur sekolah yang dapat memperoleh pendidikan. Dalam tahun 1970, baru sekitar 55% penduduk umur sekolah (7-12 tahun) yang dapat ditampung (Tabel 1). Dalam Tabel 2 terlihat perkembangan peningkatan persentase penduduk umur sekolah antara 7 - 12 tahun yang dapat ditampung selama periode 1974 - 1978: 60,1% pada tahun 1974 meningkat menjadi 76,4% pada tahun 1978. Diharapkan bahwa pada akhir Repelita III seluruh (100%) jumlah penduduk umur sekolah antara 7 - 12 tahun dapat ditampung di SD.

Walaupun pelaksanaan pembangunan SD-SD Inpres secara fungsional masih belum seluruhnya mengenai sasaran, namun telah memberikan dasar konkrit bagi pelaksanaan pemerataan di bidang pendidikan. Belum tercapainya sasaran fungsional pembangunan SD-SD Inpres disebabkan oleh:²

- a. kesulitan mendapatkan tanah, terutama di kota-kota;
- b. kesulitan mencari lokasi yang tepat berhubungan dengan tersebarnya pemukiman penduduk, khususnya di daerah-daerah terpencil;
- c. kurangnya persediaan tenaga calon guru di daerah-daerah tertentu sehingga harus dipindahkan dari daerah surplus guru;
- d. kesulitan mendapatkan tempat tinggal bagi guru-guru di daerah-daerah terpencil;
- e. masih banyak orang tua yang belum dapat menyekolahkan anaknya antara lain karena diperlukan untuk ikut mencari nafkah;
- f. kurang lengkapnya alat pendidikan yang tersedia, karena terbatasnya anggaran;
- g. prinsip bahwa setiap Kecamatan mendapat SD Inpres mengakibatkan pendirian SD tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan keperluan.

1 Lihat Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan RI di depan Sidang Umum MPR, 11 Maret 1978

2 Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Jakarta: CSIS, 1979), hal. 46

Tabel 3

Tahun	JUMLAH PARTISIPASI SEKOLAH DASAR		
	Jumlah		
	Penduduk usia 7-12 (I)	Murid usia 7-12 (II)	% II terhadap I
1974	21.214.120	12.748.347	60,1
1975	21.757.307	13.280.546	61,4
1976	22.256.269	14.461.606	64,9
1977	22.671.002	16.056.721	70,8
1978	23.092.683	17.651.826	76,4

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen P dan K, *Beberapa Masalah Pokok yang Masih Perlu Dipecahkan yang Menyangkut Pendidikan Dasar*, 1978

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PENDAPATAN

Pendapatan seseorang, apabila dilihat sebagai output pendidikan, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: sifat pekerjaan yang tersedia, daerah pemukiman tenaga pekerja, kesempatan untuk mendapatkan kerja sesuai dengan pendidikannya, kemampuan yang dapat diketahui pada waktu pendidikannya, dan lain-lain. Untuk memperkirakan hubungan antara pendidikan dan pendapatan perlu digunakan ukuran-ukuran yang operatif. Walaupun pendidikan bukan merupakan satu-satunya jenis investasi tenaga kerja (human capital), tetapi merupakan faktor yang penting dalam kehidupan (life cycle) seorang pekerja.¹ Perbedaan pendapatan karena perbedaan pendidikan di antara pekerja tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh faktor-faktor lain, misalnya pengalaman bekerja. Hubungan antara pendidikan dengan pendapatan sangat jelas terlihat apabila pendidikan pekerja tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan. Faktor usia hampir-hampir tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan seorang pekerja. Pertumbuhan pendapatan karena usia lebih banyak merupakan konsekuensi dari lamanya (pengalaman) kerja.

Di Indonesia, masalah pendidikan berhubungan dengan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor menyebabkan sulitnya para lulusan sekolah di berbagai tingkatan dalam memperoleh lapangan kerja: terba-

1 F. Thomas Juster, *Education, Income, and Human Behavior*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1974, hal. 72

tasnya kesempatan kerja di satu pihak dan rendahnya mutu pendidikan di pihak lain.¹ Dalam konsep Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional, mutu pendidikan dilihat dari segi pengetahuan, ketrampilan dan keilmuan, tetapi sebenarnya mutu pendidikan itu relatif sifatnya. Sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini, arah pembangunan di bidang pendidikan dititikberatkan kepada pemerataan pendidikan. Kebijakan ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang memperoleh sekurang-kurangnya taraf pendidikan minimal serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan. Tetapi asas pemerataan pendidikan itu tidak akan mengabaikan peningkatan mutu pendidikan. Diharapkan agar sejak pendidikan dasar sudah dapat dipersiapkan tenaga-tenaga yang mampu mengambil manfaat pendidikan dan segera dapat menjadi tenaga kerja apabila diperlukan. Sasaran dari pemerataan pendidikan adalah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga trampil dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Menanggapi konsep Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional tentang penjenjangan sistem pendidikan, Dr. J. Muller berpendapat bahwa mengingat Sekolah Lanjutan Pertama mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai kelanjutan pendidikan dasar dan sebagai masa peralihan ke pendidikan yang lebih tinggi, maka pendidikan dasar dapat diperluas menjadi delapan tahun.² Tetapi ditambahkannya bahwa pendidikan dasar pada pokoknya harus bersifat "terminal", artinya harus merupakan persiapan nyata untuk menyelenggarakan pekerjaan kelak. Perubahan ini dapat memperbaiki mutu SD dan sekaligus membantu rakyat banyak yang untuk sebagian besar hanya bisa menempuh taraf pendidikan dasar.

Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan dapat ditunjukkan dari perbedaan nilai median pendapatan/pegawai menurut tingkat pendidikan, seperti terlihat dalam Tabel 4. Tabel 4 yang menunjukkan peningkatan nilai median pendapatan buruh/pegawai menurut tingkat pendidikan, kiranya dapat menunjang pendapat Dr. J. Muller di atas. Dasar pemikiran yang dapat dipakai adalah sebagai berikut. Nilai median sebesar Rp 4.580,00 per bulan untuk buruh/pegawai yang tidak sekolah, berarti bahwa 50% dari kelompok tersebut menerima pendapatan di bawah Rp 4.580,00 per bulan. Nilai median pendapatan mereka yang bersekolah tetapi tidak menamatkan SD adalah sekitar 40% lebih tinggi daripada mereka yang tidak bersekolah; lulusan SD menerima pendapatan (nilai median) sekitar 2 kali, lulusan SLP 4 kali, lulusan SLA sekitar 5 kali, lulusan akademi sekitar 8 kali, dan lulusan universitas sekitar 12 kali lebih besar daripada pendapatan (nilai median) mereka yang tidak bersekolah.

1 *Kompas*, 16 Oktober 1979

2 *Kompas*, 17 Oktober 1979

Dengan perkataan lain, investasi untuk pendidikan — dinyatakan dalam jumlah tahun pendidikan — memberikan hasil (rate of return) yang tidak linier; artinya, setiap tambahan satu tahun pendidikan tidak memberikan tambahan pendapatan yang sama besarnya. Lulusan SLP (9 tahun pendidikan) memperoleh kenaikan pendapatan yang cukup berarti (2 kali pendapatan lulusan SD); tetapi pendapatan lulusan SLA (12 tahun pendidikan) hanya 25% di atas pendapatan lulusan SLP. Dengan demikian, dari sudut ekonomi, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, apabila memang tidak berniat meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi (akademi atau universitas), adalah efisien untuk menghentikan pendidikannya setelah tingkat SLP.

Tabel 4

PENDAPATAN (NILAI MEDIAN) BURUH/PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN							
	Tidak sekolah	Belum tamat SD	SD	SLP	SLA	Akademi	Universitas
Jumlah tahun pendidikan *	0	<6	6	9	12	15	17
Median pendapatan (Rp/bulan)	4.580	6.363	9.672	18.273	23.349	37.178	54.741
Indeks	(100)	(139)	(211)	(399)	(510)	(812)	(1.195)

* Dalam arti jumlah minimum tahun pendidikan di tiap jenjang pendidikan

Sumber: Diolah dari Lampiran 1

Sudah barang tentu pernyataan tersebut telah mengesampingkan faktor-faktor: (1) Usia pekerja, yang dapat ditunjukkan dengan lamanya kerja maupun jumlah jam kerja dalam sehari/seminggu, pada saat itu di mana faktor-faktor tersebut mempunyai konsekuensi terhadap pendapatan maupun pertumbuhan; (2) Adanya tuntutan pribadi, yaitu adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi karena sesuatu hal misalnya alasan biaya maka terpaksa ia memasuki lapangan kerja dan apabila keadaan memungkinkan sebagian pendapatannya untuk membiayai pendidikan selanjutnya. Data mengenai hal ini memang tidak ada, namun apabila kita amati lebih dalam masalah ini kiranya cukup banyak terdapat terutama di kota-kota besar di mana sarana-sarana untuk memenuhi tujuan ini lebih memungkinkan; (3) Adanya sekolah kejuruan di samping sekolah umum. Dan

apakah dengan mengikuti pendidikan pada sekolah kejuruan akan mempengaruhi pendapatan seseorang, memang benar, tetapi perbedaannya relatif tidaklah besar. Dari data yang ada (Lampiran 1) ternyata jumlah buruh/pegawai yang berpendidikan tamat tingkat SLP kejuruan untuk semua golongan pendapatan masih lebih kecil (kurang dari 30%) daripada buruh/pegawai yang berpendidikan tamat tingkat SLP umum.

Contoh lain yang menggambarkan pengaruh pendidikan terhadap pendapatan seseorang adalah Peraturan Gaji Pegawai Sipil. Gaji pegawai negeri secara jelas mencerminkan sekaligus tingkat pendidikan dan masa kerja (lihat Lampiran 4). Selain gaji pokok besarnya pendapatan yang diperoleh seorang pegawai negeri tergantung dari berbagai macam tunjangan yang ditetapkan berdasarkan: (a) jumlah keluarga; (b) tingkat kemahalan hidup; (c) tugas-tugas yang menjadi kewajibannya; dan (e) tunjangan lain-lain. Gaji pertama seorang pegawai negeri yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan PGPS diberikan menurut ruang/golongan gaji yang ditentukan untuk pangkat itu, akan tetapi faktor masa kerja atau pengalaman kerja juga diperhatikan dalam penetapan gaji permulaan pegawai tersebut.¹

Contoh di atas adalah sistem penetapan gaji seorang pegawai menurut pendidikannya. Sistem pemberian gaji di masing-masing tempat bekerja akan berlainan, bisa berdasarkan sistem borongan, sistem prestasi, sistem karier dan sebagainya, di mana faktor pendidikan dapat atau tidak berpengaruh terhadap pendapatan seorang pekerja.

Seperti dikatakan di atas, hubungan antara pendidikan dengan pendapatan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Seseorang dapat berprestasi tinggi biarpun pendidikannya relatif rendah, misalnya karena dapat mengabdikan kemampuan fisiknya. Tenaga kerja semacam ini biasa disebut sebagai tenaga kerja tanpa ketrampilan (unskilled) bila tidak memiliki pendidikan sama sekali dan tenaga kerja semi-skilled bila memiliki ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan yang tidak penuh. Sedangkan adanya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (lulusan Perguruan Tinggi) tetapi mempunyai pendapatan yang relatif rendah dapat juga disebabkan berbagai faktor, misalnya: sifat/macam pekerjaan yang tidak cocok dengan pendidikan yang didapat; atau kurangnya kesempatan kerja yang telah tersedia; dan sebagainya.

PENDIDIKAN DI MASA PEMBANGUNAN

Hasil pembangunan di bidang pendidikan, secara ekonomi tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang singkat. Namun pendidikan sebagai salah

1 Drs. Marsono, *Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, PT Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal. 48

satu unsur dari investasi tenaga kerja (human capital) sangat berpengaruh terhadap keseluruhan hasil pembangunan. Tanpa peningkatan mutu pendidikan tenaga kerja yang menunjang masing-masing kegiatan pembangunan, tidak akan dapat meningkatkan hasil pembangunan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tetapi pengaruh pendidikan ini tidak hanya harus dilihat secara makro, melainkan juga secara mikro, yaitu terhadap peningkatan pendapatan penduduk.

Sebagai penyelenggara dan pengelola sistem pendidikan nasional pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar, khususnya untuk mengatasi persoalan yang timbul karena rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk. Di sini diartikan bahwa dipandang dari perorangan, pendidikan adalah sesuatu yang dikonsumsi. Oleh karena itu biaya pendidikan juga harus dipikul oleh masyarakat (perorangan). Maka berdasarkan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan (umum) yang membebaskan sama sekali biaya pendidikan sangat tidak mendidik masyarakat itu sendiri. Akan tetapi untuk memperkirakan berapa besar nilai tambah (dalam arti keuntungan) dari pendidikan setelah memasuki lapangan kerja adalah sangat sulit.

Sementara ini pembangunan telah menjangkau masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak terutama masyarakat berpendapatan rendah. Sistem pendidikan yang baik dipastikan dapat menopang keberhasilan kegiatan pembangunan dimaksud. Dengan demikian keadaan pembagian pendapatan penduduk Indonesia dapat diperbaiki. Menurut data tahun 1976 tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (lulusan Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi) hanya sekitar 4,1% dari seluruh jumlah tenaga kerja di berbagai kegiatan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebagian terbesar berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Sekitar 36,8% tenaga kerja pertanian tidak pernah sekolah; 38,6% pernah sekolah tetapi tidak tamat SD; sedangkan sejumlah 22,7% telah menamatkan SD. Tenaga kerja yang berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi sebagian besar (63,3%) bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Di sektor industri, sektor yang diberi peranan penting dalam Repelita III dan seterusnya, ternyata hanya 3,3% dari seluruh tenaga kerjanya berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi, sedangkan 91,5% berpendidikan SD ke bawah.¹ Dari gambaran keadaan pendidikan pada tahun 1976 tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih rendah pendidikannya.

Dengan adanya sekolah kejuruan tampaknya lulusan SLP kejuruan saat ini belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pendapatannya. Ada kemungkinan bahwa bagi lulusan SLP maupun SLA kejuruan lebih mudah

1 Lihat Lampiran 2

mendapatkan lapangan pekerjaan daripada lulusan SLP maupun SLA umum dalam alam pembangunan sekarang ini.

Dalam hubungannya dengan pengembangan sumber-sumber alam yang merupakan potensi utama kekayaan negara, sangat dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang trampil. Manusia merupakan pengelola yang harus memanfaatkan, memelihara dan mengamankan kekayaan alam. Tanpa adanya peningkatan kualitas dari manusia-manusianya bukan tidak mungkin kekayaan alam yang tersedia akan rusak. Pendidikan juga mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Lampiran 1

JUMLAH BURUH/PEGAWAI MENURUT BESARNYA PENDAPATAN SEBULAN DARI PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, TAHUN 1976

Besarnya pendapat- an sebulan (Rp)	Tidak sekolah	belum tamat SD	Pendidikan yang ditamatkan				Akademi	Univer- sitas
			SD	SLP	SLA			
- 3.000	1.049.561	785.941	248.159	25.920	13.570	750	-	
3.000 - 4.999	1.311.194	1.114.786	507.278	37.286	25.156	1.037	145	
5.000 - 6.999	692.141	898.471	531.550	58.834	32.713	1.810	-	
7.000 - 9.999	600.165	911.573	642.409	101.844	61.732	1.353	108	
10.000 - 14.999	292.748	629.866	644.808	234.656	199.918	6.142	2.021	
15.000 - 19.999	149.727	383.868	514.861	229.438	227.468	13.686	2.023	
20.000 - 29.999	54.991	211.845	392.688	254.863	344.520	29.940	7.739	
30.000 - 39.999	13.125	63.375	140.735	153.258	241.271	32.279	11.980	
40.000 - 49.999	4.194	13.493	52.947	61.741	98.567	24.554	15.827	
50.000 - 74.999	2.285	10.580	32.416	44.128	74.277	26.942	20.073	
75.000 - 99.999	1.133	1.875	6.575	11.542	19.169	9.190	12.516	
100.000 - 149.999	192	615	1.305	1.795	7.200	4.681	5.779	
150.000 - 249.999	-	131	2.931	1.439	3.369	2.618	5.388	
250.000 - 299.999	-	-	102	20	302	178	872	
300.000 +	511	-	99	198	1.316	620	2.904	
Jumlah	4.171.967	5.026.419	3.718.875	1.217.555	1.351.864	155.780	87.375	

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, 1976*, vus 79-27, hal. 174

Lampiran 2

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 1976

Lapangan pekerjaan	Tidak sekolah	Belum tamat SD	Pendidikan				Jumlah
			SD	SLP	SLA	PT	
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	10.592.253	11.238.421	6.621.253	537.829	119.422	7.005	29.117.283
2. Pertambangan, Penggalian	28.398	44.105	24.511	6.117	7.132	3.102	113.365
3. Industri Pengolahan	1.203.427	1.490.324	936.844	206.366	117.926	13.385	3.968.272
4. Listrik, Gas, Air	178	3.897	7.274	6.581	7.717	1.398	27.045
5. Bangunan	138.392	310.190	270.202	55.950	34.867	5.661	815.262
6. Perdagangan besar eceran serta Rumah makan dan Hotel	2.041.177	2.257.877	1.821.566	434.908	234.773	23.594	6.813.895
7. Angkutan, Pengudangan dan Komunikasi	158.130	416.489	481.475	141.916	74.741	11.232	1.283.983
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan & Tanah dan Jasa Perusahaan	1.988	11.887	20.384	13.647	35.809	10.718	94.433
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Perorangan	729.422	1.055.732	1.255.805	775.892	1.039.530	190.403	5.048.784
10. Lain-lain	7.608	5.591	6.878	1.960	2.857	1.021	25.915
Jumlah	14.900.973	16.834.513	11.446.192	2.181.166	1.674.774	268.619	47.306.237

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Sakernas 1976

Lampiran 3

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH

Tingkatan dan jenis sekolah	Negeri		Integrasi	Swasta			Jumlah
	Induk	Filial		Subsidi	Bantuan	Swasta	
Sekolah Dasar/SD	72.011	-	-	4.700	1.201	5.627	83.539
SD Biasa	56.445	-	-	4.700	1.201	5.627	67.973
SD Inpres	15.566	-	-	-	-	-	15.566
Sekolah Lanjutan Pertama	1.961	373	1.574	432	421	4.634	9.395
SMP	1.567	347	787	341	383	4.093	7.518
SMEP (SM Ekonomi Pertama)	37	10	376	25	6	276	730
SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama)	110	-	96	42	24	84	356
ST (Sekolah Teknik)	247	16	315	24	8	181	791
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1.143	107	7	263	135	1.705	3.360
SMA	483	43	-	116	62	660	1.364
SMEA	234	27	4	30	31	348	674
SKKA	48	9	1	11	8	80	157
STM	129	16	2	42	16	364	569
SPG (Sekolah Pendidikan Guru)	199	12	-	64	18	252	545
SGO (Sekolah Guru Olahraga)	50	-	-	-	-	1	51

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Persekolahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1977, 1977

Lampiran 4

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TANGGAL 1 MARET 1977

GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				MASA KERJA GOL.	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				
		b 700	c 800	d 900		a 1100	b 1200	c 1300	d 1400		a 1700	b 1800	c 1900	d 2000		a 2400	b 2500	c 2600	d 2700	e 2800
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	13.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	15.700	16.500	17.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	17.100	18.100	19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	15.600	-	-	-	0	21.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	18.500	19.700	21.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	16.800	-	-	-	2	23.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	19.900	21.300	22.800	3	-	26.900	28.200	29.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	18.000	-	-	-	4	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	21.300	22.900	24.600	5	-	29.300	30.800	32.400	0	34.100	35.900	37.800	39.800	0	42.200	44.700	47.300	50.000	52.800
12	19.200	-	-	-	6	27.800	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	-	22.700	24.500	26.400	7	-	31.700	33.400	35.200	2	37.500	39.500	41.600	43.800	2	47.000	49.700	52.500	55.400	58.400
14	20.400	-	-	-	8	30.000	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
15	-	24.100	26.100	28.200	9	-	34.100	36.000	38.000	4	40.900	43.100	45.400	47.800	4	51.800	54.700	57.700	60.800	64.000
16	21.600	-	-	-	10	32.200	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17	-	25.500	27.700	30.000	11	-	36.500	38.600	40.800	6	44.300	46.700	49.200	51.800	6	56.600	59.700	62.900	66.200	69.600
18	22.800	-	-	-	12	34.400	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
19	-	26.900	29.300	31.800	13	-	38.900	41.200	43.600	8	47.700	50.300	53.000	55.800	8	61.400	64.700	68.100	71.600	75.200
20	-	-	-	-	14	36.600	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
21	24.600	28.300	30.900	33.600	15	-	41.300	43.800	46.400	10	51.100	53.900	56.800	59.800	10	66.200	69.700	73.300	77.000	80.800
22	-	-	-	-	16	38.800	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	17	-	43.700	46.400	49.200	12	54.500	57.500	60.600	63.800	12	71.000	74.700	78.500	82.400	86.400
24	-	30.400	33.300	36.300	18	41.000	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
					19	-	46.100	49.000	52.000	14	57.900	61.100	64.400	67.800	14	75.800	79.700	83.700	87.800	92.000
					20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
					21	44.300	48.500	51.600	54.800	16	61.300	64.700	68.200	71.800	16	80.600	84.700	88.900	93.200	97.600
					22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
					23	-	-	-	-	18	64.700	68.300	72.000	75.800	18	85.400	89.700	94.100	98.600	103.200
					24	47.600	52.100	55.500	59.000	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
					25	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
					26	-	-	-	-	21	69.800	73.700	77.700	81.800	21	92.600	97.200	101.900	106.700	111.600
					27	-	55.700	59.400	63.200	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
										23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
										24	74.900	79.100	83.400	87.800	24	99.800	104.700	109.700	114.800	120.000

Catatan Lampiran 4

Syarat pengangkatan:

Gol. I. Sekurang-kurangnya tamat Sekolah Dasar VI tahun.

Untuk golongan I/b, c, d,:

- (1) sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama jurusan yang diperlukan atau sederajat dengan itu, atau
- (2) mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan untuk pangkat-pangkat golongan gaji I.

Gol. II. (1) Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu, atau

- (2) mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan dan lulusan ujian dinas tingkat I yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat-pangkat golongan gaji II.

Untuk golongan II/b, c, d,

Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan kejuruan khusus 2 tahun di atas SLTA, Sarjana Muda/Bakaloreat Perguruan Tinggi menurut jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu.

Gol. III dan IV

- (1) Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Tinggi tingkat Sarjana menurut jurusan yang diperlukan atau yang sederajat dengan itu, atau

Untuk golongan III:

- (2) Mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan serta lulus ujian dinas tingkat II yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gaji III.

Untuk golongan IV:

- (3) Mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang diperlukan serta lulus ujian dinas tingkat III yang disyaratkan untuk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar pangkat-pangkat golongan gaji IV.